

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan salah satu komponen yang paling penting dalam memperoleh informasi tentang kondisi keuangan dan merupakan bentuk transparansi keuangan. Satuan kerja merupakan bagian dari unit di Kementerian/Lembaga yang memiliki fungsi untuk melaksanakan APBN. Setiap satuan kerja memiliki kewajiban menyampaikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggungjawaban dari pelaksanaan anggaran pada Kementerian/Lembaga. Kualitas dan keandalan dari laporan keuangan sangat diperlukan untuk menyajikan informasi keuangan yang dapat diterima dan dimanfaatkan oleh semua pihak. Untuk itu, proses rekonsiliasi diperlukan dalam rangka memastikan kualitas laporan keuangan satuan kerja tetap terjaga.

Proses rekonsiliasi laporan keuangan adalah proses membandingkan pencatatan pembukuan pada satuan kerja kementerian/lembaga dengan pembukuan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku Kuasa Bendahara Umum Negara. Rekonsiliasi ini bertujuan untuk memastikan kualitas keandalan laporan keuangan satuan kerja. Proses rekonsiliasi dengan hasil yang baik akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan andal.

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau yang biasa disingkat SAKTI merupakan sistem informasi berbasis website yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sebagai sarana bagi satuan kerja untuk melakukan tahapan perencanaan anggaran sampai dengan pertanggungjawabannya. SAKTI mulai dikembangkan penggunaannya kepada seluruh satuan kerja kementerian/lembaga pada tahun 2021, yang sebelumnya masih berupa piloting di beberapa kementerian saja. Pada tahun 2022 SAKTI dikembangkan lagi menjadi SAKTI full modul dan digunakan oleh seluruh satuan kerja Kementerian Negara/Lembaga.

Dengan adanya konsep SAKTI, dikembangkan pula Monitoring Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau Monsakti. Monsakti adalah aplikasi berbasis web yang memiliki fungsi untuk melakukan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran hingga pengawasan dan pengendalian internal satuan kerja. Aplikasi Monsakti ini telah resmi dipergunakan sejak tahun 2022 setelah diterbitkannya Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-29/PB/PB.6/2022 tanggal 12 Juli 2022 hal Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Semester I Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Kelebihan dari Monsakti dalam hal proses pelaksanaan rekonsiliasi adalah ter-push-nya data secara otomatis dari SAKTI satuan kerja ke aplikasi Monsakti. Dengan adanya otomasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, akurasi, dan keandalan proses rekonsiliasi sehingga bisa terbentuk laporan keuangan satuan kerja yang berkualitas dan andal. Meskipun pelaksanaan Monsakti sudah dilaksanakan sejak tahun 2022 secara penuh di seluruh satuan kerja, namun pedoman pelaksanaan rekonsiliasi baru disahkan pada bulan September 2023 dengan diterbitkannya Peraturan Dirjen

Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Seperti yang kita ketahui konsep Monsakti memiliki potensi yang sangat luar biasa, namun dalam pelaksanaannya masih sering terdapat masalah dan kendala-kendala seperti data yang *ter-push* untuk rekonsiliasi memerlukan waktu yang lama, server website yang sering kali *down*, hingga pengetahuan operator atau bendahara satuan kerja yang masih terbatas sehingga masih banyak rekonsiliasi yang belum berhasil pada saat batas akhir penyampaian rekonsiliasi setiap periodenya dan mengakibatkan satuan kerja dikenai sanksi akibat keterlambatan tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah implementasi penggunaan Monsakti pada proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja mitra KPPN Samarinda tahun 2023 sudah sesuai dengan pedoman pada Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-8/PB/2023 tentang Tata Cara Monitoring Kualitas Data Laporan Keuangan, Rekonsiliasi, dan Penyampaian Laporan Keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Selain itu karya tulis ini juga dibuat untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan apa saja yang dimiliki oleh aplikasi Monsakti dalam konteks proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja mitra KPPN Samarinda serta mengisi kesenjangan pengetahuan akibat kurangnya penelitian terkait Monsakti mengingat perdirjen pedoman rekonsiliasi tersebut masih baru.

Dengan dilakukannya peninjauan dan analisis implementasi aplikasi Monsakti pada proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja mitra KPPN

Samarinda tahun 2023, diharapkan bisa ditemukan rekomendasi praktis dalam hal peningkatan efisiensi dan perbaikan proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja mitra kerja KPPN Samarinda. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja menggunakan aplikasi Monsakti dan manfaat dari proses rekonsiliasi tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses rekonsiliasi laporan keuangan menggunakan Monsakti di Wilayah Kerja KPPN Samarinda?
2. Bagaimana perbedaan pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan portal Monsakti dengan e-Rekon?
3. Bagaimana dampak implementasi Monsakti pada proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja di Wilayah Kerja KPPN Samarinda?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui proses rekonsiliasi laporan keuangan menggunakan Monsakti di Wilayah Kerja KPPN Samarinda.
2. Untuk dapat mengetahui perbedaan pelaksanaan rekonsiliasi menggunakan portal Monsakti dengan e-Rekon.
3. Untuk mengetahui dampak apa saja dalam penerapan Monsakti pada proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja di Wilayah Kerja KPPN Samarinda.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

1. Penelitian ini difokuskan pada proses rekonsiliasi laporan keuangan satuan kerja mitra KPPN Samarinda.
2. Penelitian difokuskan pada proses rekonsiliasi pada Tahun Anggaran 2023.
3. Penelitian mengkaji konsep dan prinsip Monsakti serta penerapannya dalam proses rekonsiliasi laporan keuangan.
4. Penelitian ini berfokus pada lingkup KPPN Samarinda dan satuan kerja di wilayah kerja KPPN Samarinda serta tidak melibatkan wilayah kerja lainnya.

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini penulis buat dengan harapan dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik, kepentingan pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Mitra KPPN Samarinda, dan bermanfaat bagi Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda selaku Kuasa BUN yang bertugas melakukan rekonsiliasi, serta penulis harap Karya Tulis Tugas Akhir ini dapat bermanfaat sebagai bahan evaluasi pelaksanaan rekonsiliasi di KPPN Samarinda dan sebagai alat untuk perbaikan dan penyempurnaan aplikasi Monsakti ke depannya.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB II LANDASAN TEORI

2.1. Dasar Hukum

2.2. Rekonsiliasi

2.3. Aplikasi Monsakti

2.3. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

3.1. Metode Pengumpulan Data

3.1.1 Studi Kepustakaan

3.1.2 Wawancara

3.1.3 Kuisisioner

3.2. Gambaran Umum Objek Penulisan

3.2.1 KPPN Samarinda

3.2.2 Seksi Verifikasi dan Akuntansi

3.3. Pembahasan Hasil

3.3.1 Proses Rekonsiliasi Laporan Keuangan Menggunakan Monsakti di KPPN Samarinda

3.3.2 Perbedaan proses rekonsiliasi menggunakan Monsakti dibandingkan dengan menggunakan aplikasi e-Rekon

3.3.3 Dampak Monsakti dalam rekonsiliasi laporan keuangan pada satuan kerja di wilayah KPPN Samarinda

BAB IV SIMPULAN